

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI
DENGAN PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS
BAIQ NURIL)**

SKRIPSI

Oleh:

Khoirun Nisa
C05216028



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirun Nisa
NIM : C05216028
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara (*Siyāsah*)
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pemberian
Amnesti Dengan Pertimbangan Kemanusiaan
(Studi Kasus Baiq Nuril).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Januari 2020

Saya yang menyatakan


Khoirun Nisa
C05216028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khoirun Nisa NIM. C05216028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 06 Januari 2020

Pembimbing,




Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khoirun Nisa ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 16 Januari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum
NIP.196602122007011049


Penguji II,


Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP.197803102005011004

Penguji III,


H. Mahir, M.Fil.I
NIP.197212042007011027

Penguji IV,


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP.198710192019031006

Surabaya, 16 Januari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



M. Ag.
NIP.198004041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khoirun Nisa
NIM : C05216028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : Khoirunnisatis1974@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI DENGAN
PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS BAIQ NURIL)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Februari 2020

Penulis

Khoirun Nisaa

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemberian Amnesti Dengan Pertimbangan Kemanusiaan (Studi Kasus Baiq Nuril)” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah pertama, bagaimana analisis pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Dengan Pertimbangan Kemanusiaan dan bagaimana analisis *fiqh siyasah* jika dikaitkan dengan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril melalui pertimbangan kemanusiaan?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan dalam penelitian hukum yang berupa *statute approach*. Adapun teknik yang digunakan adalah *library research*. Kemudian menganalisa menggunakan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif terhadap pemberian amnesti kepada Baiq Nuril dengan pertimbangan kemanusiaan sebagai hukum positif dan dihubungkan dengan konsep *fiqh siyāsah dusturiyah* dan menggunakan *al-Afwu*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian amnesti kepada Baiq Nuril diberikan atas dasar rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus hak istimewa yang dimilikinya, atas laporan dari Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram dengan dasar hukum Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut pandangan *fiqh siyasah dusturiyah*, terjadi kesesuaian antara pemberian amnesti oleh Presiden dengan kajian *imamah* dan konsep *al-Afwu* yang mengedepankan kemaslahatan umat. Artinya, konsep *al-Afwu* ini diberikan ketika ada seorang umat yang telah melakukan kesalahan dan menyadari atas tindakan tersebut, maka pemimpin memberikan ampunan. Konteks tersebut sama hal nya dengan kasus Baiq Nuril yang mana telah mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo, karena amnesti sendiri merupakan sifat pengampunan dari pemimpin.

Sejalan dengan hasil penelitian maka dibutuhkan agar cepat terselesaikannya peraturan yang lebih lanjut dan khusus terkait perundang-undangan tentang amnesti. Selain itu, pemerintah harus mengevaluasi tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebab di dalam peraturan tersebut masih menimbulkan pasal karet dan siapapun bisa terjebak akibat salah tafsir.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP UMUM <i>FIQH SIYASAH</i> dan TEORI AMNESTI.	20
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i>	20
B. Pengertian dan Objek Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	23
C. Konsep <i>al-Afwu</i>	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas yakni bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat ataupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atas dasar peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan hukum harus memenuhi unsur-unsur antara lain kepastian, kemanfaatan serta keadilan.

Kepastian hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memenuhi maksud dan tujuan hukum yakni keadilan.¹ Hukum perlu dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok.

Negara hukum dengan konsep *the rule of law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey mempunyai tiga ciri penting. Pertama, *supremacy of law* artinya bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang baik rakyat maupun pemerintah, keduanya harus tunduk pada hukum. Kedua, *equality before of the law*

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

Konsep tersebut menandai adanya ciri negara hukum zaman sekarang, di Indonesia prinsip negara hukum telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, di mana setiap manusia pasti mempunyai kepentingan.² Sehingga, siapapun yang melakukan sebuah perbuatan masih di lingkup Negara Indonesia haruslah berdasarkan dengan hukum. Demikian dengan Presiden, Presiden telah diberikan kewenangan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.³

Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan memerlukan landasan atau dasar dalam menjalankan pemerintahan suatu negara yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 diantaranya, Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”. Sedangkan, sebagai Kepala Negara Presiden mempunyai tugas-tugas pokok yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 salah satunya tertuang dalam Pasal 14 Ayat (2) “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

² Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, 1.

³ Jimmy Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

Amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut.⁵

Periode 2014-2019 Presiden Joko Widodo telah tercatat memberikan amnesti sebanyak dua kali, yang pertama diberikan pada tahun 2016 kepada mantan pimpinan kelompok bersenjata di Aceh Timur yakni Nurdin Ismail alias Din Minimi. Pada tahun 2017 mencuat kasus Baiq Nuril yang sebelumnya berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) selanjutnya ditahan dalam

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara* (Depok: Pranamedia Group, 2017), 143.

Ketentuan tersebut membuat Penasihat Hukum serta Baiq Nuril mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung justru menolak Permohonan Peninjauan Kembali Baiq Nuril dengan Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019.⁹ Keputusan ini semakin tidak adil bagi Baiq Nuril yang sedang mencari keadilan sebab dia hanya menjadi korban atas pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Putusan Nomor 83 Pk/Pid.Sus/2019 Didownload Tanggal 26 Oktober 2019 Pukul 02.15

membuat judul kajian “**Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pemberian Amnesti Dengan Pertimbangan Kemanusiaan (Studi Kasus Baiq Nuril).**”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah diatas yang memuat masalah-masalah, berikut identifikasinya:

- Dasar peraturan perundang-undangan yang dijadikan dalam pemberian Amnesti.
- Seseorang yang berhak memberikan amnesti.
- Seseorang yang berhak menerima adanya amnesti.
- Seseorang yang berhak memberikan pertimbangan dan nasihat terkait adanya amnesti.
- Analisis *fiqh siyāṣah* terhadap pemberian amnesti dengan pertimbangan kemanusiaan dalam kasus Baiq Nuril.

2. Batasan Masalah

Penelitian terhadap suatu masalah yang lebih spesifik untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan lengkap serta tidak menimbulkan suatu kalimat yang bersifat meluas dengan ini membatasi masalah yang nantinya akan dikaji, hanya pada batasan :

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan hukum tata negara, khususnya pemberian amnesti dengan pertimbangan kemanusiaan dalam kasus Baiq Nuril berdasarkan *Fiqh Siyāsah*.

Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti lain.

Demi mendapatkan gambaran yang jelas, arah dan tujuan serta untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penegasan terkait skripsi yang diangkat, di antaranya:

- [illegible]

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian²⁸ sebagai berikut :

²⁸Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi:²⁹
 - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/Pn Mtr.
 - 4) Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.
 - 5) Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019.
 - 6) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:
 - 1) Kansil “Pokok-pokok Hukum Pidana”.
 - 2) Sudikno Mertokusumo “Menenal Hukum”.
 - 3) Titik Triwulan Tutik “Pokok-pokok Hukum Tata Negara”
 - 4) Imam Amrusi Jailani “Hukum Tata Negara Islam”.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, koran, jurnal, majalah, artikel dan internet.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 181.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu metode yang pengumpulan bahan-bahan nya diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji oleh penulis untuk dijadikan penelitian skripsi. Dalam penelitian ini penulis melakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum , skripsi surat kabar online, artikel online, buku terkait maupun pendapat dari para ahli sarjana yang mempunyai kesamaan dalam judul penelitian ini sehingga dapat menunjang penelitian penulis agar cepat terselesaikan.

5. Teknik Analisis Data

Menyusun secara sistematis bahan hukum dengan memberikan klarifikasi tertentu dalam rangka memudahkan menganalisa pasal demi pasal dalam suatu Undang-undang ataupun kaidah hukum yang terkandung di dalam bahan hukum. Setelah itu menganalisa menggunakan deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.³⁰ Analisis dari penelitian ini berdasarkan pada Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pemberian

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 126.

pemberian amnesti dengan pertimbangan kemanusiaan (Studi Kasus Baik Nuril).

Bab Kelima, merupakan bab penutup dengan mengemukakan kesimpulan dari permasalahan atau pembahasan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam proses penelitian ini diikuti penyampaian saran atas topik pembahasan skripsi.

Bagian terakhir, berisi daftar pustaka ataupun lampiran-lampiran yang menunjang terciptanya penelitian skripsi ini.

Siyāṣah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Sejalan dengan pemikiran Ibn Taimiyah yang menganggap bahwa makna kontekstual khususnya dalam Surat An-Nisa' Ayat 58 dan 59 tentang dasar-dasar pemerintahan adalah unsur terpenting dalam format *siyāṣah*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . (٥٩)

³⁴ Imam Amrusi Jailani, et al. *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 17.

23

Menurut Suyuthi Pulungan, *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (Mashalih) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks ini adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, Negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat.

Kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan kepada nash-nash yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban.³⁵

Ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan terkait pengertian *siyāsah* dari para ahli hukum Islam, selanjutnya dapat ditarik benang merah bahwasannya *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk urusan umat dan Negara dengan segala peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan, harus sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁶

³⁵ Pulungan, *Fiqh Siyāsah...*, 25.

³⁶ Ibid, 26.

- Kajian utama *fiqh siyasah* adalah *siyasah dusturiyah* dimana pembuatan Undang-undang akan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.³⁸ Selain itu juga membahas mengenai konsep Negara hukum melalui hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara dan hak warga negara yang wajib untuk dilindungi.³⁹

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177.

B. Pengertian dan Obyek Kajian *Siyāṣah Dustūriyah*

Dustūrī berasal dari bahasa Persia artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan *zoroaster* (majusi).⁴⁰ Setelah penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang menjadi asas, dasar atau pembinaan.

Menurut istilah, *dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata *dustūr* dalam bahasa Indonesia, artinya Undang-undang dasar suatu Negara.⁴¹ Kemudian kata *dustūr* ini disamakan dengan *constitution* dalam bahasa Inggris.

Suyuthi Pulungan, memberikan definisi bahwa *siyāsah dustūriyah* adalah peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (Kepala Negara), serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁴² Taqiyudin an-Nabhani menambahkan bahwa landasan seluruh peraturan Negara, harus digali dari Al-Quran dan sunnah dengan menempatkan *ijma'* dan *qiyas* sebagai pendukung.⁴³

⁴⁰ Ibid, 178.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 281.

⁴² Pulungan, *Fiqh Siyāsah...*, 40.

⁴³ Taqiyudin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik* (Bangil: Al-Izzah, 1996) cet 1, 17.

3. Ummah

Menurut Abdul Rosyid membandingkan makna *ummah* dengan nasionalisme, antara lain:⁵¹

- ⁵⁰ Jailani, et al. *Hukum Tata Negara Islam...*, 26.

[illegible]

Kedudukan *imamah* ada dua hal yang mengahruskan untuk mundur dari kepemimpinannya yakni akibat dari syahwat dan syuhbat (tidak jelas). Jika sifat ini ada pada pemimpin, maka pemimpin harus mengundurkan diri. Yusuf Musa menjelaskan bahwa kewajiban *imamah*, untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.⁵⁹

a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa yang telah disepakati oleh umat salaf.

⁵⁹ Yusuf Musa, *Nidham al-Hukmi fi al-Islam* (Darul Kitabil Arabi: Al-Qahirah, 1963), 150.

- b. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula menjadi kafir dzimi.
- g. Memungut fay dan sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayar pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan

Negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta Negara harus diurus oleh orang yang jujur.

- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.⁶⁰

Al-Mawardi menyebut Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu. Selanjutnya, yang terpenting ulil amri harus menjaga, melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *kasb al-halal*, hak beragama, dan lain-lain.

Tugas seorang imam tidak hanya terbatas pada memimpin umat manusia dalam salah satu aspek politik, kemasyarakatan dan perekonomian. Serta, tidak terbatas pada masalah-masalah tertentu seperti tugas-tugas seorang amir atau khalifah, namun tugasnya adalah menyampaikan kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupan yang bermacam-macam.

Tujuan kepemimpinan di dalam Islam adalah *“Iqomatuddin wa siyasatud dunya bihi”* artinya menegakkan agama dan mengatur urusan dunia dengan agama). *Iqomatuddin* yaitu menegakkan agama yang dibagi bentuk menjadi dua macam. Pertama, menjaga agama (*hifzud din*) dan yang kedua adalah

⁶⁰ Abu hasan al-Mawardi, *al-Ahkam....*, 61.

C. Konsep *al-Afwu*

Secara etimologi, kata *al-Afwu* terambil dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf yaitu ‘*ain, fa, dan waw*.⁶¹ Menurut Imam Ibn Manzbur, kata ini di dalam Al-Qur’an mengandung makna yang cukup beragam di antaranya adalah meninggalkan sesuatu, menghapus, melindungi menutupi, dan membebaskan. Dalam tafsir al-Mishbah, makna kata ini berkisar pada dua hal yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini, lahir kata *al-Afwu* yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (Memaafkan). Perlindungan Allah SWT dari keburukan dinamakan ‘*afiyah*

Perlindungan, mengandung makna tertutupan. Dari sini, kata al-Afwu juga diartikan menutupi. Bahkan, dari rangkaian ketiga huruf di atas, lahir makna terhapus atau habis tiada berbekas karena yang terhapus dan habis tidak berbekas pasti ditinggalkan. Pemaafan Allah SWT berarti Allah SWT menghapus kesalahan hamba-hambanya serta meninggalkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran mereka.

Kata al-Afwu dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan kata “maaf”, telah menjadi khazanah bahasa Indonesia sehingga digunakan dalam bahasa sehari-hari. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata maaf memiliki tiga arti yaitu, Pertama, pembebasan seseorang dari hukuman (tuntutan, denda dan lain sebagainya) karena suatu kesalahan.

⁶¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 427.

Kedua, ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Ketiga, kata “maaf” biasanya digunakan untuk ungkapan permintaan ampun atau penyesalan.⁶²

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ . (١٩٩)⁶³

Dalam pandangan Islam, mampu memaafkan kesalahan orang lain termasuk sebagian dari akhlak yang sangat mulia dan luhur. Hal ini merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa (*Muttaqin*) dan itu merupakan sikap yang diutamakan di sisi Allah SWT. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikaji menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah maaf-memaafkan (*al-Afwu*), akan ditemukan bahwa konsep Al-Qur'an mengenai *al-Afwu* adalah perintah memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah atau zalim bukan perintah meminta maaf.

Al-Afwu yang dimaksud ialah berlapang dada dalam memberikan ma'af kepada orang lain yang telah melakukan kesalahan, tanpa disertai rasa benci di hati. Apalagi merencanakan pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan, meskipun seseorang yang didzalimi sanggup melakukan pembalasan itu. Akan tetapi, jika sikap kompromi itu hanya masih menyimpan dendam bahkan merencanakan pembalasan di lain waktu, maka sikap seperti ini tidak termasuk dalam kategori *al-Afwu*.⁶⁴

⁶² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 794.

⁶³ OS Al-A'raf: 199

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 364.

1. Memmaafkan dosa dan tidak menghukum.
2. Bermakna kelebihan, karena yang berlebih seharusnya tidak ada dan harus ditinggalkan, yakni dengan memberi siapa yang memintanya.
3. Menghapus dan membinasakan serta mencabut akar sesuatu.
4. Berlapang dada dalam memberikan ma'af kepada orang lain yang telah melakukan kesalahan, tanpa disertai rasa benci di hati.

Setelah mengetahui makna dari *al-Afwu*, langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk menggali kontekstualisasi makna dari *al-Afwu* adalah mempelajari penerapan makna tersebut dalam al-Qur'an. Untuk memahami bagaimana penerapan pada masing-masing ayat atau kata, perlu memahami pula akar kata atau kosa kata.

Menurut Ashaf Shaleh dalam bukunya Takwa: makna dan Hikmahnya dalam Al-Qur'an, bahwa kata *al-Afwu* tertuang dalam Al-Qur'an sebanyak 35kali yang berarti memaafkan dosa dan tidak menghukum.⁶⁶

⁶⁵ Abdul Mun'im Al-Hasyimi, *Akhlaq Rasul Menurut Bukhari dan Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet I, 357-358.

⁶⁶ Ashaf Shaleh, *Takwa: Makna dan Hikmahnya dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Erlangga), 106

Kata *al-Afwu* berkenaan dengan Allah swt. Selain itu kata *al-Afwu* juga memang merupakan salah satu dari Al-Asma Al-Husna (nama-nama Allah yang indah) artinya yang suka memaafkan yaitu dengan menghapus kesalahan hamba-hamba-Nya serta memaafkan pelanggaran-pelanggaran mereka.⁶⁷ Secara maknawi mengandung sebuah pesan bahwa Allah swt memberikan perintah terhadap Nabi, Rasul dan seluruh hambanya untuk mempunyai sifat pemaaf. Namun Allah swt tidak hanya memerintah saja, akan tetapi dengan memberikan sebuah uswatun (tauladan). Hal ini dibuktikan dengan penegasan Allah swt bahwa dia lah Maha Pengampun yang akan mengampuni siapapun yang mau meinta ampunan kepada-Nya dengan syarat benar-benar bertaubat.

1. Memaafkan kesalahan orang lain

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

2. Tidak menggunjing orang lain

Dengan penegasan tersebut tidak ada alasan lagi bagi seorang hamba untuk tidak melaksanakan al-Afwu. Seberat apapun perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang kepada orang lain, sudah selayaknya bagi manusia untuk mengaplikasikan *al-Afwu*.

[illegible]

1. Pengertian Amnesti

Amnesti berasal dari bahasa Yunani yakni *amnestia* artinya “melupakan”. Tindakan untuk melupakan atas kejahatan yang diberikan kepada seorang atau sekelompok orang. Seseorang yang telah diberikan

[illegible]

- Perbedaan pokok antara amnesti dengan grasi terletak pada pertimbangan Presiden yang didasarkan pada Mahkamah Agung untuk Grasi, sedangkan amnesti terletak pada pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, untuk perbedaan amnesti dengan rehabilitasi dapat ditemukan di Pasal 1 angka 23 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwasannya rehabilitasi itu untuk mendapat pemulihan hak seorang dalam kedudukan harkat martabatnya yang diberikan berdasarkan Undang-undang karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.⁷³

Pemberian amnesti tidak semata-mata diberikan begitu saja tetapi, didalamnya terdapat proses yang cukup ketat berdasarkan aturan yang

[illegible]

”Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan oleh Undang-undang ataupun atas kuasa Undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung” pernyataan tersebut merupakan bunyi dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal 107 Ayat (3).⁷⁴ Namun, Undang-undang Dasar Sementara ini telah digantikan atau kembali pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Penegasan kembali bahwa “Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara 1950”.⁷⁵ Dasar hukum pemberian amnesti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 setelah diamandemen tercantum pada Pasal 14 Ayat (2) berbunyi: “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.⁷⁶

Ketentuan amnesti yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 merupakan ketentuan yang dapat menghapuskan hak penuntutan atas

⁷⁶ Penerbit Ilmu, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya (Amandemen I, II, III, dan IV)*, 13.

Undang-undang Darurat No.11 Tahun 1954 ditetapkan sebagai Undang-undang dengan berlandaskan Undang-undang No.1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan semua Perppu yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang.⁷⁸ Sehingga, Undang-undang Darurat No.11 Tahun 1954 masih dijadikan landasan hukum untuk pemberian amnesti dan abolisi.

Undang-undang Darurat No.11 Tahun 1954 lahir dari akibat Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya Pasal 96-107

⁷⁸ Muchtar Rosyidi, *Penuntun Perundang-undangan Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 531.

yang menjelaskan bahwa Presiden mempunyai hak penuh memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Selanjutnya, untuk melaksanakan Pasal 96-107 Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 diterbitkan Undang-undang Darurat No.11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.

Berlakunya Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 menimbulkan sistem Demokrasi Parlementer biasa disebut Demokrasi Liberal. Akibatnya, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah, Negara Republik Indonesia dengan Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila.

Undang-undang Dasar 1945 berlaku kembali pada periode Tahun 1966 setelah Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950. Pemberian amnesti ini nantinya diberikan lewat Keputusan Presiden No.22 Tahun 2005 Tentang Pemberian amnesti terhadap aktifis Gerakan Aceh Merdeka. Keputusan Presiden No.449 Tahun 1961 Tentang Pemberian amnesti dan abolisi kepada orang yang tersangkut dengan pemberontakan.

A. Hak Prerogatif Presiden

1. Pengertian Hak Prerogatif Presiden

Hak prerogatif berasal dari dua kata yaitu Hak dan Prerogatif. Prerogatif adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang atau aturan, Prerogatif berasal dari bahasa Latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberikan suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *prae* (diminta sebelum meminta yang lain).⁷⁹

Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden atau Kepala Negara untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris.

Hak prerogatif adalah kekuasaan yang masih tersisa di tangan Raja atau Ratu dan tidak diatur Undang-undang. Sehingga, Raja atau Ratu Inggris hanya simbol. Dalam praktek ketatanegaraan perannya hampir tidak ada. Bentuk hak prerogatif yang sekarang masih dimanfaatkan Raja atau Ratu misalnya, menganugerahi gelar bangsawan kepada seseorang.⁸¹

⁸⁰ Forum Keadilan, Volume 12, Edisi Nomor 19. (Agustus, 2001), 13.

[illegible]

makin berkurang karena beralih ke tangan rakyat (Parlemen) atau unsur-unsur pemerintah lainnya seperti menteri.⁸²

Bagir manan berpandangan, kekuasaan prerogatif mengandung beberapa karakter, yaitu Pertama sebagai *residual power*, Kedua kekuasaan diskresi, Ketiga tidak ada hukum tertulis, Keempat penggunaannya dibatasi, Kelima akan hilang apabila telah diatur dalam Undang-undang ataupun Undang-undang Dasar.

Menurut Almarhum Padmo Wahjono seorang ahli hukum tata negara berpendapat bahwa Undang-undang Dasar 1945 tidak mengenal hak prerogatif. Penjelasan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 hanya menyebutkan bahwa kekuasaan Presiden tersebut ada konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Sebab, didasarkan dari peraturan perundang-undangan ataupun pertimbangan dari lembaga tinggi negara lainnya.⁸³

Indonesia merupakan Negara Hukum yang fungsi dan tugas pemerintah direntang menjadi sedemikian luas sehingga tidak lagi sekedar melaksanakan Undang-undang. Tugas pokok pemerintah di dalam Negara hukum adalah membangun kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diciptakanlah lembaga kewenangan yang disebut *freies ermesen* yakni suatu kewenangan bagi

⁸² Ibid., 109.

⁸³ Ibid, 113.

pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut.⁸⁴

Freies ermessen dalam bidang perundang-undangan ada tiga macam kewenangan yaitu kewenangan inisiatif (Membuat peraturan yang sederajat dengan Undang-undang tanpa harus meminta persetujuan parlemen terlebih dahulu dengan syarat bahwa peraturan tersebut dibuat karena keadaan memaksa), kewenangan delegasi (Membuat peraturan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan Undang-undang) dan *droit function* (Membuat penafsiran sendiri atas materi peraturan).

Pemerintah dalam mengimplikasikan *freies ermessen* ditandai dengan adanya hak prerogatif. Sehingga, seberapa besar porsi untuk memegang hak prerogatif bagi pemerintah akan sangat ditentukan oleh seberapa besar pula penganutan terhadap wawasan negara hukum.⁸⁵ Mahfud MD berpendapat, ada atau tidaknya hak prerogatif dalam konstitusi tidak menjadi masalah, tergantung bagaimana memaknai hak prerogatif itu. Sebab hak prerogatif itu ada jika Presiden berhak melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan orang atau lembaga lain. Oleh sebab itu, hak prerogatif tidak perlu dihapus, hanya dikurangi.⁸⁶

2. Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Pasca Amandemen

a. Hak Prerogatif Presiden Sebelum Amandemen

⁸⁴ Moh Mahfud, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 260.

⁸⁵ Ibid., 261.

⁸⁶ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia:...*, 121.

Amnesti adalah hak Kepala Negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap suatu perbuatan atau kejahatan. Abolisi adalah hak Kepala Negara untuk menggugurkan hak penuntutan umum untuk menuntut seseorang. Abolisi berlaku politik diberikan dengan cara massal atau individu. Rehabilitasi adalah hak Kepala Negara untuk mengembalikan seseorang kepada kedudukan dan nama baiknya yang semula tercemar oleh karena suatu keputusan hakim yang tidak benar.⁸⁷

Tahun 1999 bangsa Indonesia melakukan perubahan atas Undang-undang Dasar 1945. Dalam sistem ketatanegaraan telah dapat dilihat dari hasil perubahan terutama menguatnya format dan

[illegible]

mekanisme *check and balances* serta pengaturan lebih rinci tentang perlindungan Hak Asasi Manusia.

Reformasi yang terjadi di Indonesia menghendaki adanya perubahan di segala bidang. Salah satunya perubahan dalam bidang ketatanegaraan. Oleh sebab itu, perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia adalah menjadi sebuah keharusan.

Perubahan Undang-undang Dasar 1945 meliputi sistem pelebagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan Negara yang utama legislatif, eksekutif dan yudikatif, pengaturan jaminan hak asasi manusia yang lebih rinci, dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan Negara misalnya pemilihan umum, pendidikan, kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, pertahanan serta keamanan dan lain-lain.

Pembahasan menyangkut Presiden dan Wakil Presiden mendapat sorotan tajam dari para anggota panitia *ad hoc* III Badan Pekerja (BP MPR). Mulai dari hak-hak Presiden, masa jabatan Presiden sistem pengisian jabatan Presiden atau Wakil Presiden sampai dengan masalah pertanggungjawaban Presiden merupakan perdebatan yang cukup panjang.

Ketentuan tersebut menimbulkan tidak jelasnya batas kewenangan Presiden dalam menjalankan fungsi yang dimiliki oleh Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, karena adanya

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden salah satunya Pasal 14 yang awalnya hanya berupa Pasal tidak memuat tentang ayat, dalam Pasca Amandemen ini memuat beserta ayatnya yang dibagi dua yakni: Pasal 14 Ayat (1) “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Dan Pasal 14 Ayat (2) “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Sebelum amendemen Undang-undang Dasar 1945, kewenangan Presiden khususnya Pasal 14 merupakan hak prerogatif Presiden yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Presiden tanpa harus

[illegible]

Awal tahun 2012 Baiq Nuril sebagai pegawai honorer di SMAN 7 Mataram seringkali mendapatkan telepon dari atasannya yakni Kepala Sekolah dari SMAN 7 Mataram Haji Muslim yang bercerita soal hubungannya dengan wanita lain yakni Landriati. Baiq Nuril sempat diisukan memiliki hubungan special dengan Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah di SMAN 7 Mataram, akan tetapi isu tersebut ditampik oleh Baiq Nuil.

[illegible]

Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, menyatakan antara lain:

- [illegible]

3. Penjatuan pidana dalam perkara *a quo* diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Baiq Nuril maupun masyarakat Indonesia agar dapat berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik.

1. Baiq Nuril terbukti dan telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018, hal tersebut bukanlah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau kekliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Maka, dalam putusan *judex juris* adanya keberatan dari Baiq Nuril tidak dapat dibenarkan sebab, adanya kekurangan pengetikan dalam penulisan angka pasal yang seharusnya tertulis Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- ### C. Prosedur Pemberian Amnesti di Indonesia

Kewenangan tersebut mutlak ditangan Presiden dalam menjalankan fungsinya yang sudah diatur oleh Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam memberikan amnesti perlu memperhatikan pertimbangan Badan Legislatif. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam bidang Yudikatif, tetapi Presiden dalam menggunakan hak ini bukan campur tangan kewenangan lembaga yudikatif, tetapi tugas atau kekuasaan umum dari eksekutif yang berasal dari Undang-undang, yang meliputi.⁹⁰

⁹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara...*, 142.

- Presiden memberikan amnesti harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat (2). Dalam pertimbangan ini nantinya lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) akan bermusyawarah lewat komisi yang membidangi masalah hukum, yakni pada komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.

“Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang anggota dapat mengajukan usul kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.

[illegible]

A. Analisis Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Dengan Pertimbangan Kemanusiaan

Ketiga hak tersebut merupakan hak dasar yang tidak dapat dihilangkan dan dikurangi dari setiap manusia dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Berkaitan dengan hak atas rasa aman, Pasal 28G Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:⁹⁴

⁹⁴ Pasal 28G Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi karena tidak puas dengan hasil dari putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan Baiq Nuril. Setelah dikabulkannya kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung, Baiq Nuril tidak terima dengan putusan tersebut dan akhirnya mengajukan Peninjauan Kembali yang akhirnya ditolak.

Kebenaran berbanding terbalik Baiq Nuril menjadi tersangka. Kemudian, untuk menjalankan amanat dari Pasal 29 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia maka, dalam hal ini Presiden

Pasal 33 Ayat (1) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Berkesiambungan dengan penegasan pada Pasal 29 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bahwasannya Baiq Nuril juga berhak untuk bebas dari penghukuman pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali yang awalnya ditolak permohonannya.

Surat rekomendasi yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan memuat isi diantaranya:⁹⁵

- ⁹⁵ Surat Rekomendasi Komnas Perempuan No. 101/KNAKTP/Pimpinan/VII/2019

mendatangkan beberapa ahli hukum pidana, serta perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat tentang layakanya Baiq Nuril ini diberikan hak istimewa oleh Presiden berupa amnesti ataupun grasi.

Baiq Nuril yakin bahwa Presiden Joko Widodo akan memberikan kartu sakti yang berupa amnesti kepadanya. Waktu-waktu tersebut Baiq Nuril gunakan untuk mengirimkan secarik surat kertas mungil dari tulisannya sendiri menggunakan pena, tumpahan air mata dan kasih sayang yang benar-benar rindu terhadap anak-anak nya yang menunggu dirumah sejak lama. Rangkaian kata tersebut pada pokoknya berisi tentang permintaan Presiden Joko Widodo supaya memberikan amnesti.

Presiden Joko Widodo dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menekan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian amnesti atas rasa kemanusiaan nya kepada Baiq Nuril. Presiden Joko Widodo mengumumkan kepada masyarakat Indonesia bahwasannya amnesti ini layak diberikan kepada Baiq Nuril dan Presiden Joko Widodo mengungkapkan surat Keputusan Presiden ini bisa diambil di Istana Negara.

Tangisan bahagia ketika mendengarkan bahwa Baiq Nuril telah mendapatkan surat sakti yang berupa amnesti dari keempat surat sakti yang dimiliki Presiden atau Kepala Negara. Baiq Nuril dengan kepasrahan hatinya langsung menghadap arah kiblat dan bersujud kepada Allah swt atas perjuangan yang begitu berat, dan perjalanan yang sangat amat panjang demi keadilan. Baiq Nuril berterima kasih sebanyak-banyaknya

Berdasarkan atas kasus Baiq Nuril tersebut, dapat dikatakan akibat adanya kepastian hukum yang adil. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan ini sejalan dengan arah dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

Kepastian hukum yang berkeadilan adalah sebagai konsekuensi dari Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Sebuah negara hukum harus dijunjung tinggi dan tidak dipersempit maknanya terkait negara sebagai perundang-undangan. Hukum selalu beresensi dengan keadilan, sedangkan peraturan perundang-undangan mungkin saja tidak mengandung keadilan. Peraturan yang tidak adil bukanlah hukum dan harus ditinggalkan dalam konteks sebuah negara hukum.⁹⁶

Kasus Baiq Nuril merupakan pengabaian terhadap kepastian hukum yang menyebabkan kehilangan haknya untuk mendapatkan keadilan.

[illegible]

Keadilan substantif baru terpancar ketika Baiq Nuril mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Dengan demikian amnesti yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Baiq Nuril adalah berkepastian hukum. Tidak peduli dinilai sesuai aturan atau tidak, tepat atau tidak tepat. Pada intinya Presiden Joko Widodo telah memberikan sebuah kepastian hukum berupa rasa kemanusiaan yang adil kepada Baiq Nuril Maknun.

Fiqh Siyāsah Dusturiyah salah satu yang di dalam nya membahas tentang persoalan *imamah* atau biasa disebut dengan pemimpin. Kepemimpinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktural maupun fungsi. Artinya, kedua kata tersebut mempunyai keterkaitan baik dari segi kata maupun makna. Pemimpin merupakan orang yang memiliki segala kelebihan dari orang lain dan paling dianggap pandai tentang berbagai hal misalnya pandai memburu, cakap dan berani untuk berperang.⁹⁷

[illegible]

Ahlu al-ḥalli wa al-‘aqli atau yang biasa disebut sekarang dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugas di bidang *siyāṣah tashri’iyah* sedangkan Presiden bergerak dalam bidang *siyāṣah tanfidhiyah* yakni urusan terkait lembaga eksekutif. Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat sejatinya harus saling bermusyawarah dalam bidang apapun. Dapat dilihat dalam perkara Baiq Nuril, baik Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat selalu mengedepankan kemaslahatan atas kasus dari Baiq Nuril sendiri.

Kepemimpinan dalam Islam dikatakan tepat apabila didasarkan kepada sistem dan cara yang dipraktikkan dalam memimpin. Kepemimpinan dalam Islam merupakan sebuah kepemimpinan yang harus didasari dengan nilai-

Keberadaan pemimpin merupakan sebuah keharusan atau yang biasa disebut dengan wajib. Kewajiban ini didasarkan pada *Ijma'* para sahabat tabi'in. Dalam konteks yang berbeda kewajiban adanya pemimpin berdasarkan dengan argumentasi rasional (*Aqli*) belaka bukan bersumber dari syariat agama. Jika, peraturan yang ada dalam sebuah Negara dibuat oleh para elite bangsa maka pemerintahan itu disebut Negara yang berdasarkan atas rasio (*Aqli*). Peraturan yang bersumber dari ketentuan Allah swt melalui Rasul-Nya, maka pemerintahan itu berdasarkan atas syariat agama.

Pemerintahan berdasarkan dengan agama ini sangat bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi bangsa. Sebab, kemaslahatan umat manusia tidak akan sempurna dan agama tidak akan tegak tanpa adanya pemimpin. Dengan begitu terlihat jelas betapa pentingnya kepemimpinan sehingga Rasulullah saw mewajibkan tiga orang yang sedang bepergian untuk memilih salah satunya sebagai pemimpin. Selain itu, keberadaan pemimpin juga untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran.

Kewajiban adanya pemimpin didasarkan pada argumentasi tentang ketaatan ulil amri:

Pemimpin merupakan kewajiban syar'i berdasarkan dengan *Ijma'*, namun kewajiban itu menurut al-Mawardi bersifat kifayah seperti halnya kewajiban berjihad dan menuntut ilmu. Artinya, apabila ada ahli yang telah mendirikan, maka gugurlah kewajiban seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah *amr bi syay' amr bi wasa'ilih* artinya perintah untuk mengerjakan sesuatu yang berarti pula perintah untuk mengerjakan perintah dari penghubungnya. Negara dan pemimpin adalah penghubung atau alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Beranjak dari pergantian khalifah setelah Nabi Muhammad saw wafat, maka setelah itu para ulama' banyak yang mencoba memberikan kriteria

1. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil sebagaimana dalam surat an-Nisa' Ayat 58.
2. Laki-laki sebagaimana dalam surat an-Nisa Ayat 34.
3. Merdeka. Artinya, merdeka dari segala hal dengan demikian seorang pemimpin diharapkan mampu berfikir, bertindak, berbuat, mengabdikan dengan masyarakat secara maksimal dan tidak pilih kasih dalam menjalankan roda kepemimpinannya.
4. Baligh, yakni sudah dewasa dan mempunyai kecerdasan emosional.
5. Berakal sehat, tidak mempunyai cacat mental yang dimaksud adalah cerdas yang akhirnya dapat mengemban tugas.
6. Mampu menjadi Hakim yang menguasai ilmu hukum, maupun dalam mengambil keputusan dengan menggunakan ijtihad.
7. Mempunyai keahlian tentang militer.
8. Tidak cacat fisik, artinya agar dalam menjalankan roda kepemimpinannya tidak terjadi keterburukan jika seorang pemimpin cacat maka tidak optimal dalam menjalankannya, karena banyak tugas yang harus dikerjakan dalam pemerintahan.

[illegible]

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril sudah seharusnya diberikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia atas representasi Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat”. Frasa memperhatikan berarti terciptanya lembaga yang saling mengawasi dalam bentuk dan hal apapun. Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Baiq Nuril bukan semata-mata ingin menerapkan adanya peraturan yang sudah dibuat melainkan juga melalui rasa kemanusiaan yang ada pada diri seorang Kepala Negara atas tindakan rakyat nya yang selama ini dinilai kurang adil artinya Baiq Nuril selama ini merasa bahwa tidak ada keadilan untuk dirinya, yang kenyataanya Baiq Nuril adalah seorang korban atas kasus Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Fiqh siyasah masuk kategori sebagai *siyasah dusturiyah*, yang salah satunya membahas kewajiban dan hak seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. *Imamah* dalam melaksanakan suatu tugas harus berdasarkan dengan kemasalahatan umatnya. Begitu pun, dengan konsep

al-Afwu yang harus selalu ada dalam diri manusia yang telah diberikan oleh Allah swt sebagai seorang yang pemaaf dan tidak boleh dendam terhadap sesama meskipun orang tersebut tetap bersikap buruk kepada kita.

B. Saran

Peraturan terkait adanya amnesti seharusnya lebih dipertegas lagi, karena peraturan yang ada hingga saat ini masih menggunakan peraturan lama. Turunan peraturan tersebut merupakan akibat dari lahirnya Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Terkait, dengan kasus Baiq Nuril yang terjerat akibat salah satu pasal dari UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun memerlukan tafsiran yang lebih jelas. Sebab, di dalam isi Undang-undang tersebut masih menimbulkan pasal karet dimana setiap orang yang terkena pasal tersebut bisa juga terkena pasal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh-eye, *Amnesti GAM diberikan dengan atau tanpa persetujuan DPR*. <http://www.aceh-eve.org>. Diakses pada Tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 20.00.
- Adainuri, Ibnu Qutaibah. *Al-Imamah wa al-Siyasah*. Muasasah al-Halabi: Qahairah Mesir, 1967.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015.
- An-Nabhani, Taqiyudin. *Sistem Pemerintahan Islam Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, cet.1. Bangil: Al-Izzah, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- , *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asikin, Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Awwalin, Sabiqinal. *"Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam"*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Djazuli, A. *Edisi Revisi Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- , *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Forum Bebas, *Memahami Istilah Amnesti*. <http://www.forumbebas.com/thread-19348.htm>. Didownload Tanggal 01 Desember 2019 Pukul 22.53
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, cet.1. Yogyakarta: FH 79 ss, 2003.

- Iswanto, Hasbi. *"Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)"*. Skripsi--Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- , *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jailani, Imam Amrusi et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kaharudin, *Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, No.2 Vol.23. Media Hukum, 2016
- Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007.
- , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid II.
- Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. <http://www.parlmen.net>. Diakses pada Tanggal 10 Oktober 2019 Pukul 15.45
- Khallaf, Abdul Wahab., *al-Siyasah al-Syar'iyah*.
- Kholiq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Ooffet, 2005.
- Mahfud, Moh. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, cet.1 1999.
- Mary, Siti Rakhma. *Pemberian Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan*. Bogor: Sajogyo Institute, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Politik Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Musa, Yusuf. *Nidham al-Hukmi fi al-Islam*. Darul Kitabil Arabi: Al-Qahirah, 1963.

Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka, cet.1, 2006.

